

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Golkar dilakukan dalam konteks Pemilu Legislatif 2024, serta bagaimana mekanisme tersebut dijalankan berdasarkan kerangka teori rekrutmen politik dan realitas lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan, seperti perwakilan DPD Golkar, perwakilan Golkar Institute, dan Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar, penelitian ini menemukan sejumlah kesimpulan penting.

Pertama, rekrutmen caleg Partai Golkar berlangsung secara bertahap dan berjenjang, dengan mekanisme formal yang mengalir dari bawah ke atas. Proses diawali di tingkat DPD Kabupaten/Kota, kemudian dilanjutkan ke DPD Provinsi, dan berakhir di DPP sebagai pemegang keputusan final yang dikepalai oleh Ketua Umum. Mekanisme ini mencerminkan pola rekrutmen vertikal, di mana jalur kaderisasi dan loyalitas terhadap struktur partai memainkan peran penting. Namun, proses tersebut tidak sepenuhnya tertutup. Meskipun kandidat harus menjadi anggota partai terlebih dahulu, terdapat jalur rekrutmen lateral yang dibuka melalui program pendidikan politik dan pengkaderan non-struktural seperti *Executive Education for Young Political Leaders* dari Golkar Institute. Program ini terbuka untuk siapa saja, termasuk non-kader, dan memberikan peluang untuk masuk ke dalam orbit partai dengan cara yang lebih inklusif.

Kedua, proses seleksi calon legislatif di Golkar tidak hanya ditentukan oleh syarat administratif seperti keanggotaan dan latar belakang pendidikan (minimal lulusan SMA), tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis seperti popularitas, elektabilitas, pengaruh sosial, dan kesiapan logistik. Partai mencari calon yang tidak hanya loyal secara

struktural, tetapi juga memiliki kemampuan nyata untuk menang dalam pemilu. Oleh karena itu, faktor seperti kemampuan memobilisasi massa, kapasitas personal dalam memengaruhi opini publik, serta kesiapan sumber daya menjadi indikator penting dalam menentukan siapa yang dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen caleg merupakan proses politis yang sangat strategis dan tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi elektoral.

Ketiga, peran organisasi sayap Partai Golkar dalam proses penjaringan juga sangat signifikan. Terdapat sepuluh organisasi yang berada di bawah struktur partai dan aktif memberikan kontribusi dalam mengusulkan dan menilai kelayakan caleg. Organisasi-organisasi ini mencakup SOKSI, MKGR, Kosgoro, KPPG, AMPG, AMPI, Cakatar Ulama, Al Hidayah, Majelis Dakwah Indonesia, dan AWK (Arya Wedakarna). Masing-masing memiliki basis sosial dan fokus yang berbeda dari buruh, pengusaha, perempuan, anak muda, hingga komunitas keagamaan. Dalam proses penjaringan, organisasi-organisasi ini mengusulkan kandidat yang berasal dari lingkungan mereka masing-masing, kemudian bermusyawarah bersama untuk menilai calon berdasarkan prinsip PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela). Ini menjadi mekanisme kolektif yang menunjukkan bahwa keputusan partai tidak hanya diambil oleh elite pusat, tetapi juga melalui representasi organisasi yang tersebar di berbagai lini partai.

Keempat, dinamika internal partai menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan dominasi oleh figur “anak keturunan” atau keluarga kader senior, Partai Golkar tetap memberikan ruang bagi kader non-keturunan yang memiliki kapasitas dan kekuatan elektoral. Anak keturunan memang memiliki akses logistik dan nomor urut yang cenderung lebih strategis, namun bukan berarti tidak ada ruang bagi kader lainnya. Wawancara menunjukkan bahwa calon yang berasal dari luar lingkaran keluarga partai tetap bisa diusung, bahkan diprioritaskan, selama mereka memiliki elektabilitas tinggi, jejaring sosial yang kuat, dan reputasi yang baik. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun struktur partai cenderung

menjaga kesinambungan melalui garis keluarga, Golkar tetap menjaga unsur meritokrasi dalam praktiknya.

Kelima, tantangan utama dalam rekrutmen caleg bukan berasal dari minimnya kader atau kurangnya partisipasi politik, melainkan dari aspek logistik dan kompetisi internal. Golkar justru mengalami kelebihan kader potensial, sehingga banyak tokoh yang tidak mendapatkan ruang untuk maju karena terbatasnya jumlah kursi yang tersedia. Dalam kondisi ini, partai menghadapi tantangan dalam menentukan siapa yang benar-benar paling layak untuk diusung. Logistik menjadi faktor penentu dalam tahap akhir, karena keberhasilan dalam kampanye sangat bergantung pada kemampuan personal dan dukungan jaringan di daerah pemilihan. Selain itu, Golkar juga harus bersaing dengan partai-partai penguasa yang memiliki keunggulan dalam hal sumber daya, akses birokrasi, dan visibilitas publik.

Keenam, dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, pola rekrutmen di Partai Golkar tidak mengalami perubahan yang mendasar. Mekanisme seleksi tetap mengikuti jalur struktural partai yang telah mapan. Namun demikian, terdapat penguatan dalam aspek pendidikan politik dan pelibatan generasi muda. Inisiatif seperti pelatihan di Golkar Institute dan peningkatan representasi pemuda dalam struktur partai merupakan bentuk evolusi partai dalam menjawab tantangan regenerasi. Kendati demikian, perubahan ini lebih bersifat penguatan dari sistem yang sudah ada, bukan perombakan menyeluruh terhadap model rekrutmen.

Secara keseluruhan, pola rekrutmen caleg Partai Golkar pada Pemilu 2024 mencerminkan sistem yang memadukan antara keterbukaan dan kontrol internal. Di satu sisi, partai membuka ruang seleksi yang lebih luas melalui jalur organisasi sayap dan pendidikan politik terbuka. Namun di sisi lain, partai tetap menegakkan disiplin keanggotaan dan mempertahankan hierarki dalam pengambilan keputusan. Golkar menampilkan wajah partai modern yang mencoba menyeimbangkan nilai loyalitas struktural dengan kebutuhan kompetisi elektoral yang semakin kompleks. Dalam konteks ini,

rekrutmen politik di Golkar tidak hanya menjadi instrumen distribusi kekuasaan, tetapi juga arena negosiasi antara berbagai kepentingan antara kader senior dan pemula, antara anak keturunan dan profesional muda, serta antara struktur formal dan jejaring sosial politik yang lebih luas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola rekrutmen Partai Golkar dalam mendorong keterlibatan generasi muda pada Pemilu Legislatif 2024, penulis merumuskan beberapa saran yang terbagi dalam dua bagian, yakni saran akademis dan saran praktis. Kedua bentuk saran ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan studi politik dan perbaikan sistem rekrutmen partai politik di Indonesia.

5.2.1 Saran Akademis

1. Perluasan Objek Studi Melalui Komparasi Partai Politik

Penelitian ini secara khusus berfokus pada Partai Golkar sebagai studi kasus utama. Namun, ke depan, disarankan agar penelitian serupa dapat diperluas dengan pendekatan komparatif antarpolitical party. Misalnya, membandingkan Partai Golkar dengan partai yang lebih muda seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau Partai NasDem yang memiliki pendekatan berbeda terhadap rekrutmen kader muda. Perbandingan ini akan memperkaya literatur mengenai rekrutmen politik di Indonesia serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan keunggulan tiap pola rekrutmen yang diterapkan.

2. Penguatan Landasan Teoretis Melalui Perspektif Multi-Teori

Penelitian ini menggunakan teori Pippa Norris tentang pola rekrutmen politik sebagai kerangka utama. Ke depan, peneliti disarankan untuk mengembangkan pendekatan teoretis yang lebih luas, misalnya dengan menggabungkan teori elite (elite theory),

patron-klien, atau bahkan teori institusional. Hal ini dapat memberikan dimensi analitis yang lebih dalam terhadap proses dominasi elite, peran hubungan sosial-politik, serta struktur internal partai dalam menentukan arah dan hasil rekrutmen politik.

3. Perluasan dan Pendalaman Data Primer

Penelitian di masa depan juga disarankan untuk memperluas cakupan informan, tidak hanya dari internal partai dan tim kampanye yang berhasil, tetapi juga dari kader-kader muda yang belum berhasil mencalonkan diri atau yang mengalami hambatan dalam proses seleksi. Dengan mendengarkan berbagai suara dari spektrum pengalaman kader, maka analisis akan menjadi lebih komprehensif dan berimbang dalam menggambarkan realitas proses rekrutmen politik.

4. Kajian Dampak Jangka Panjang Rekrutmen terhadap Kualitas Legislator

Penelitian ini berfokus pada proses awal dan strategi kampanye. Saran akademis lainnya adalah agar peneliti ke depan dapat mengkaji lebih jauh dampak jangka panjang dari pola rekrutmen terhadap kualitas kinerja politik kader muda yang terpilih. Misalnya, bagaimana kontribusi mereka dalam proses legislasi, pengawasan, serta pelayanan terhadap konstituen. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana pola rekrutmen yang berbasis meritokrasi atau elektabilitas benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi.

5.2.2 Saran Praktis

1. Peningkatan Transparansi dan Aksesibilitas Proses Rekrutmen

Partai politik, khususnya Partai Golkar, perlu memperkuat prinsip keterbukaan dan transparansi dalam proses seleksi calon

legislatif. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah menyediakan sistem pendaftaran terbuka secara daring bagi publik, dengan kriteria dan prosedur yang jelas. Sistem ini dapat dilengkapi dengan evaluasi berbasis poin yang mempertimbangkan rekam jejak, loyalitas, dan kompetensi kader. Dengan begitu, proses rekrutmen tidak lagi bersifat elitis atau tertutup, melainkan inklusif dan kompetitif.

2. Optimalisasi Fungsi Lembaga Kaderisasi Seperti Golkar Institute

Golkar Institute yang dibentuk sebagai pusat pendidikan politik internal perlu diperkuat baik secara struktur maupun kurikulum. Lembaga ini dapat dijadikan sebagai syarat sertifikasi politik bagi kader muda yang ingin mencalonkan diri. Pelatihan yang diselenggarakan sebaiknya tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga mencakup pelatihan komunikasi publik, manajemen kampanye, kebijakan publik, dan etika legislatif. Dengan demikian, kader muda tidak hanya siap secara politik tetapi juga siap menjadi wakil rakyat yang kompeten dan bertanggung jawab.

3. Evaluasi Internal terhadap Efektivitas Kaderisasi dan Kampanye

Setiap pemilu hendaknya tidak hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai momen evaluasi terhadap efektivitas sistem rekrutmen dan kaderisasi yang dijalankan oleh partai. Partai politik seperti Golkar perlu menyusun mekanisme evaluasi rutin terhadap kader muda yang telah terpilih, agar partai dapat memahami kontribusi mereka dalam jangka panjang. Evaluasi ini penting untuk menjaga kualitas kader dan memastikan regenerasi yang berkelanjutan.

4. Perluasan Akses bagi Kader Non-Keluarga Elite

Salah satu tantangan besar dalam rekrutmen politik di Indonesia adalah dominasi politik dinasti. Oleh karena itu, partai politik sebaiknya memberikan afirmasi khusus bagi kader muda dari kalangan non-elite, misalnya dengan menyediakan kuota seleksi kader dari komunitas, organisasi pemuda, atau kelompok sipil yang selama ini belum banyak terwakili. Langkah ini penting sebagai upaya konkret menciptakan demokrasi internal partai yang lebih setara dan adil.